
EFEKTIVITAS PROGRAM PERMODALAN JAKPRENEUR DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Muhammad Qurtubi*, Muhtadi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
E-mail: mqurtubi5@gmail.com

Submit: 01 Oktober 2024, **Revisi:** 15 Oktober 2024, **Approve:** 01 November 2024

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) face significant challenges, including difficulties in accessing capital, lack of collateral, and limited entrepreneurial skills. Jakpreneur is an Integrated Entrepreneurship Development (IED) program launched by Governor Anies Baswedan in 2020. The Jakpreneur program aims to enhance the capacity and competitiveness of MSMEs in DKI Jakarta. One of the flagship programs of Jakpreneur is the capital program. Through this program, the DKI Jakarta Provincial Government is able to facilitate access to capital without the need for collateral. This study aims to analyze the effectiveness and outcomes of MSME empowerment through the Jakpreneur capital program, specifically in Pesanggrahan District, South Jakarta, using a qualitative descriptive method. Primary and secondary data were collected through observation, interviews, and documentation, with informants selected using purposive sampling. Data validity was tested through source triangulation. The results show that the Jakpreneur program has proven successful in improving the economic welfare of MSME actors in Pesanggrahan District, expanding business networks, and strengthening MSME institutions. The Jakpreneur capital program has made a significant difference, including increased turnover, broader market access, and better business sustainability. The Jakpreneur capital program has proven to be effective in providing tangible positive changes, improving the economic welfare of its beneficiaries, and supporting the sustainability and growth of MSMEs.

Keywords: MSMEs, Jakpreneur, Venture Capital, Empowerment

Abstrak

Masalah utama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi kesulitan mendapatkan modal usaha, ketiadaan aset sebagai agunan, serta keterbatasan dalam keterampilan kewirausahaan. Jakpreneur merupakan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2020. Program Jakpreneur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di DKI Jakarta. Salah satu program unggulan Jakpreneur adalah program permodalan. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu memfasilitasi akses permodalan tanpa memerlukan agunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan hasil pemberdayaan UMKM melalui program permodalan Jakpreneur, khususnya di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Jakpreneur terbukti berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM di Kecamatan Pesanggrahan, memperluas jaringan usaha, serta memperkuat kelembagaan UMKM. Program permodalan Jakpreneur memberikan perubahan

nyata, termasuk peningkatan omset, akses pasar yang lebih luas, serta keberlanjutan usaha yang lebih baik. Program permodalan Jakpreneur terbukti efektif dalam memberikan perubahan positif yang nyata, meningkatkan kesejahteraan ekonomi para binaan, dan mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM.

Kata kunci: UMKM, Jakpreneur, Modal Usaha, Pemberdayaan

Pengutipan : Qurtubi, M & Muhtadi. 2024. Efektivitas Program Permodalan Jakpreneur dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. *Jurnal Kommunity Online*, 5(2), 2024, 154-170. doi: 10.15408/jko.v5i2.41602

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data dari Kemenkeu (2023) menyebutkan bahwa UMKM berkontribusi terhadap 60,34% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. UMKM juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Tingkat penyerapan karyawan yang tinggi dan rendahnya kebutuhan modal investasi memungkinkan UMKM menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang dinamis. Hal tersebut membuat bisnis kecil dan menengah (UMKM) tidak terpengaruh oleh berbagai perubahan eksternal (Astuti, Kartono, & Rahmadi, 2020)

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM juga menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM melalui prinsip kemandirian, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan klasifikasi dalam undang-undang tersebut, UMKM dikelompokkan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan kriteria berdasarkan aset dan omset tahunan. Meski program Jakpreneur telah memberikan akses yang lebih mudah kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan modal tanpa agunan, masih ada kesenjangan dalam implementasinya, terutama dalam hal kemampuan UMKM untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari pentingnya peran UMKM dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan berbagai program untuk pemberdayaan UMKM, salah satunya adalah Jakarta *Entrepreneur* (Jakpreneur) berfungsi sebagai platform yang memungkinkan warga DKI Jakarta untuk membuat, membantu, dan bekerja sama dengan ekosistem kewirausahaan. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah DKI Jakarta berharap program ini melengkapi kewajiban dan tugas Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjaring pelaku UMKM di DKI Jakarta, diluncurkan program Jakpreneur. Program ini

untuk menggantikan Program sebelumnya, *One Center for Entrepreneurship* (OK OCE), Gubernur Anies Baswedan meluncurkan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) pada tahun 2020 (Ikhsanudin, 2020). Jakpreneur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di DKI Jakarta, terutama melalui akses permodalan tanpa agunan.

Mengutip pandangan Suharto yang disampaikan oleh Widiastuti (2015), esensi dari pemberdayaan terletak pada upaya meningkatkan kapasitas individu agar lebih progresif dan mandiri. Lebih lanjut, hal ini dapat diartikan sebagai usaha untuk memungkinkan seseorang mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Tyas & Hertati, 2023). Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berarti memberi masyarakat kemampuan untuk mengatasi masalah secara mandiri (Muhtadi, 2017). Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mentransformasi kualitas hidup individu ke arah yang lebih positif dibandingkan kondisi sebelumnya, dengan sasaran akhir tercapainya kesejahteraan.

Kecamatan Pesanggrahan merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Selatan, juga ikut terlibat dalam program Jakpreneur. Kecamatan Pesanggrahan memiliki jumlah UMKM yang cukup besar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2023 terdapat sebanyak 10.000 UMKM yang terdaftar di Kecamatan Pesanggrahan. Kecamatan Pesanggrahan memiliki berbagai macam jenis usaha, mulai dari usaha kuliner, *fashion*, kerajinan, hingga jasa. Sebagian besar UMKM di Kecamatan Pesanggrahan masih memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas dan daya saing. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di wilayah Kecamatan Pesanggrahan mengungkapkan beberapa tantangan dalam implementasi program Jakpreneur. Ditemukan bahwa sebagian warga, terutama dari kalangan muda (Generasi Z), masih belum familiar dengan program ini. Selain itu, terdapat peserta UMKM yang tidak menyelesaikan rangkaian pelatihan secara utuh. Produk-produk usaha di Kecamatan tersebut juga dinilai kurang inovatif. Lebih lanjut, para pelaku UMKM, yang mayoritas adalah Perempuan, mengalami kesulitan dalam mengoperasikan platform daring Jakpreneur. Berdasarkan temuan-temuan ini, peneliti terdorong untuk melakukan investigasi lebih mendalam mengenai sejauh mana efektivitas program Jakpreneur dalam memberdayakan UMKM di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Masalah para pelaku UMKM umumnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal usaha, keterbatasan kepemilikan aset yang dapat dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit, ditambah dengan terbatasnya keterampilan dalam mengelola usaha, menjadi faktor-

faktor yang mempersulit golongan masyarakat berpenghasilan rendah memutus rantai kemiskinan yang mereka hadapi (Billy, 2023). Penting adanya lembaga yang berperan sebagai jembatan bagi para UMKM untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi para Anggota Jakpreneur untuk mengakses permodalan ke Perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu kolaborator permodalan Jakpreneur yaitu Bank DKI dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Monas Pemula, dan Monas 25. Lembaga-lembaga tersebut memberikan akses permodalan tanpa harus memberikan agunan sebagai dasar pinjaman kredit (Limanseto, 2022).

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait pemberdayaan UMKM di Jakarta melalui program Jakpreneur. Di antaranya, studi yang dilaksanakan oleh Hendro & Arlinda (2020) mengkaji dampak Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (JakPreneur) terhadap pendapatan penjualan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selanjutnya, Hana (2023) meneliti Pemberdayaan UMKM Sektor Kuliner Dalam Program Jakpreneur di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Amanullah (2022) juga melakukan kajian tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Jakpreneur di Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Fairuz (2022) dalam penelitiannya membahas tentang Pemberdayaan UMKM melalui program Kampung Bebas Rentenir (KBR) KUBE Berdaya oleh Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPM) di Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Namun, belum ada studi yang secara khusus menganalisis efektivitas Program permodalan Jakpreneur dalam memberdayakan UMKM di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan menggunakan teori efektivitas program. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Jakarta *Entrepreneur* (Jakpreneur) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (UMKM) di wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

METODOLOGI

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta mengumpulkan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019) . Hal ini penting karena peneliti perlu menganalisis fenomena yang ada dengan lebih mendalam. Beberapa hal yang akan diteliti meliputi bagaimana kondisi nyata di lapangan terkait dengan mekanisme yang diterapkan dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Pesanggrahan,

Jakarta Selatan. Peneliti juga akan mengevaluasi seberapa bermanfaat kegiatan yang difasilitasi melalui Jakpreneur.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan beberapa metode, meliputi wawancara, observasi langsung, dokumentasi, serta mengumpulkan data dari studi Pustaka. Pemilihan informan untuk wawancara dilakukan dengan cermat, memastikan narasumber yang dipilih adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan relevan terhadap objek penelitian sesuai dengan tujuan studi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang mendalam dan akurat terkait pemberdayaan UMKM di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Selatan untuk wilayah Kecamatan Pesanggrahan, Pendamping program Jakpreneur di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, serta pelaku UMKM yang telah menjadi binaan Jakpreneur di wilayah tersebut. Untuk menjamin validitas data, peneliti menerapkan metode triangulasi sumber. Sementara itu, analisis data menggunakan pendekatan kualitatif interaktif yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*), sebagaimana yang dijelaskan oleh (Zahra & Sagita, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

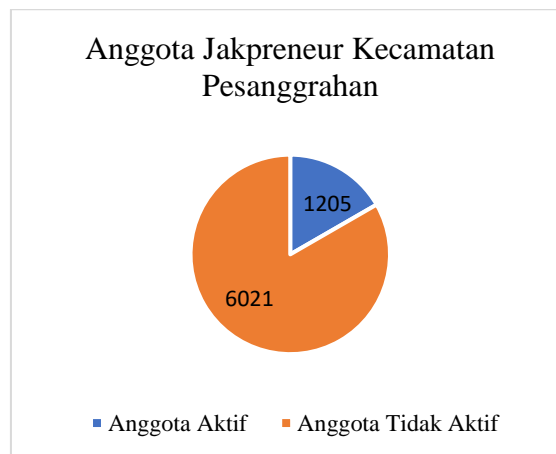
1. Efektivitas Program Permodalan Jakpreneur dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan

Pemerintah DKI Jakarta berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui program Peningkatan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yang dilaksanakan melalui Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur). Peneliti mengumpulkan data langsung di lapangan mengenai program Jakpreneur di Kecamatan Pesanggrahan. Penelitian ini akan menjelaskan efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, yang menggabungkan berbagai data dan fakta dari wawancara, data sekunder, dan informasi lain yang telah dikumpulkan. Data tersebut akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas. Penjelasan lebih rinci mengenai efektivitas Program

Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam memberdayakan UMKM di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, akan diuraikan dalam hasil penelitian berikut.

a. Ketepatan Sasaran

Menurut Sutrisno (2019) satu indikator penting dalam menilai efektivitas suatu program adalah ketepatan sasaran. Indikator ini mengukur sejauh mana program tersebut berhasil menjangkau peserta yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Korten dalam Jurnal (Anjeli & Ratnasari, 2024) menyebutkan bahwa organisasi pelaksana harus menetapkan tujuan yang sesuai dengan program yang akan dijaankan, ini merupakan hal yang penting agar sasaran yang diinginkan oleh organisasi pelaksana dapat terwujud.



Sumber: Data Sekunder Penelitian, 2024

Gambar 1. Jumlah Binaan Jakpreneur di DKI Jakarta

Dalam konteks program Jakpreneur, peserta yang telah terdaftar sebagai binaan memperoleh akses penuh ke berbagai kegiatan dan fasilitas yang disediakan tanpa biaya. Program ini tidak hanya ditujukan bagi mereka yang sudah memiliki usaha, tetapi juga bagi individu yang baru berniat memulai usaha. Jakpreneur menawarkan beragam pelatihan, baik yang bersifat materi maupun praktek. Pelatihan materi mencakup topik-topik seperti strategi pemasaran, teknik berbicara di depan umum, dan diskusi bisnis dengan para ahli. Kebijakan ini mendorong warga untuk bergabung dengan Jakpreneur termasuk warga di Kecamatan Pesanggrahan, melalui pelatihan praktis seperti menjahit dan memasak.

Ketepatan sasaran sangat penting agar bantuan permodalan yang diberikan kepada para binaan tepat dan dapat membantu usaha mereka berkembang, Jakpreneur memberikan program permodalan untuk para binaan yang sudah terdaftar sebagai

anggota Jakpreneur dan sudah sering mengikuti program-program Jakpreneur lainnya (Latifah, 2024). Pernyataan ini selaras dengan apa yang sudah diungkapkan sebelumnya oleh Bapak Egha Fahleza selaku pembimbing Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dalam wawancara.

“Untuk menentukan binaan yang tepat sasaran diberikan program permodalan jakpreneur itu para binaan yang sudah sering mengikuti pelatihan soft skill maupun hard skill, karena dari situ kan kita bisa lihat ya mas kalau binaan tersebut serius dalam menjalankan usahanya. Dan syarat yang dibutuhkannya itu mereka harus bergabung menjadi anggota Jakpreneur, lalu mempunyai usaha dan minimal usahanya sudah berjalan selama 4 bulan. Setelah itu, jika binaan tersebut mengajukan ke pembimbing untuk menggunakan permodalan, maka pembimbing akan membuat surat rekomendasi dan kita kirim ke SUDIN lalu dari SUDIN kita rekomendasikan ke Bank yang sedang bekerja sama dengan kita”(Wawancara dengan bapak Egha Fahleza, 2024)

Program Jakpreneur menunjukkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan sasaran programnya. Dengan menggunakan pendekatan yang inklusif, program ini tidak hanya terbuka bagi mereka yang sudah menjalankan usaha, tetapi juga bagi para pencari kerja yang memiliki minat dan motivasi dalam dunia kewirausahaan. Binaan Jakpreneur telah merasakan berbagai keuntungan dari fasilitas yang disediakan oleh Jakpreneur diantaranya: fasilitas desain kemasan gratis, fasilitas logo gratis, dokumen usaha, sertifikasi halal, BPOM bahkan akses permodalan.

b. Pemahaman Program

Sutrisno (2019) mengemukakan bahwa pemahaman program merupakan faktor penentu keberhasilan program. Pemahaman program yang baik di kalangan sasaran program akan memastikan program berjalan sesuai dengan rencana.

Pemahaman program Jakpreneur bagi pelaku UMKM sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan program ini secara maksimal dan efektif dalam menjalankan program-program yang sudah dicanangkan oleh Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan. Diperlukan bukti untuk mengukur sejauh mana para binaan memahami program permodalan Jakpreneur, salah satunya yang disampaikan oleh bapak Dalmilussumagek sebagai Kepala Satuan Pelaksana Jakpreneur Pesanggrahan.

“Kalau untuk kita mensosialisasikan program permodalan jakpreneur itu biasanya kita mensosialisasikan melalui seminar atau biasanya dari kegiatan-kegiatan pelatihan atau dari program-program lainnya. Selain itu juga kita menyebarkan broadcastannya melalui whatsapp group dan juga di social media kita terkadang juga mensosialisasikan program permodalan tersebut.”(Wawancara dengan bapak Dalmilussumagek, 2024)



Sumber: Data Sekunder Penelitian, 2024

Gambar 2. Sosialisasi Program Jakpreneur

Program Jakpreneur secara aktif melibatkan para mitranya melalui sosialisasi yang dilakukan minimal 12 kali dalam setahun. Sosialisasi ini bertujuan utama untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif mengenai program Jakpreneur, termasuk keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat ketika bergabung. Selain itu, sosialisasi juga berperan penting dalam membantu calon anggota yang ingin mendaftar. Kualitas program tidak hanya menentukan keberhasilannya, tetapi juga oleh kemampuan para penyelenggara dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat sasaran. Sehebat apapun programnya, jika tidak diiringi dengan sosialisasi yang efektif, maka manfaatnya tidak akan dirasakan oleh masyarakat.

c. Ketepatan Waktu

Menurut Sutrisno (2019) ketepatan waktu itu ialah suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut. Ketepatan waktu berarti menyelesaikan suatu pekerjaan atau menjalankan suatu program sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal (Sedarmayanti, 2018).

Ketepatan waktu dalam program permodalan di Jakpreneur itu sangat penting untuk memastikan bahwa para binaan dapat menerima program manfaat program secara tepat waktu dan tidak mengalami kerugian akibat pelaksanaan program tersebut. Untuk itu ketepatan waktu yang dimaksud agar para binaan bisa efektif dalam proses seleksi dan pencairan bantuan permodalan tanpa adanya kendala maupun kerugian.

Untuk waktu yang diberikan para mitra Jakpreneur dalam mengembalikan Program Permodalan itu bervariasi tergantung dengan kesepakatan antara binaan

dan pihak bank. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Bapak Egha Fahleza.

“Untuk waktu yang dibutuhkan para binaan dalam mengembalikan permodalan yang diberikan Jakpreneur itu tergantung dari kesepakatan binaan dengan pihak Bank mas, tapi biasanya itu mulai dari 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan sampai 2 tahun. Reward dari Jakpreneur tidak diberikan kepada binaan yang tepat waktu dalam mengembalikan modal tersebut.” (Wawancara dengan bapak Egha Fahleza, 2024)

Analisis temuan ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan program sangat krusial untuk mencapai tujuan pemberdayaan UMKM. Keterlambatan dalam proses seleksi dan pencairan dana dapat menghambat pertumbuhan usaha binaan, yang pada akhirnya bisa mengurangi manfaat yang diharapkan dari Program Permodalan tersebut. Variasi waktu pengembalian menunjukkan fleksibilitas dalam kesepakatan antara binaan dan juga pihak bank. Fleksibilitas ini penting untuk menyesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing binaan. Tidak adanya reward dari Jakpreneur tidak mengurangi insentif bagi binaan untuk mematuhi jadwal pengembalian.

d. Tercapainya Tujuan

Indikator pencapaian tujuan merupakan alat penting untuk mengukur seberapa jauh hasil program selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, indikator ini berfungsi untuk mengukur efektivitas program dalam mencapai target yang diinginkan (Jibril, 2017). Program permodalan Jakpreneur juga berperan signifikan dalam memberikan akses modal kepada pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal awal karena kurangnya aset untuk agunan dan minimnya keterampilan.

Kurangnya permodalan dan akses lembaga keuangan merupakan masalah umum untuk para pelaku UMKM yaitu mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal usaha. Keterbatasan akses terhadap kredit menjadi salah satu penghambat utama bagi masyarakat miskin dalam upaya keluar dari kemiskinan. Kurangnya aset untuk dijadikan agunan merupakan kendala utama dalam memperoleh pinjaman kredit. Selain itu, minimnya keterampilan kewirausahaan juga menjadi faktor penghambat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses sumber daya yang diperlukan untuk membangun usaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Usman & Sholikin, 2021). Oleh karena itu, para pelaku UMKM

tersebut dapat terbantu dengan adanya Program Permodalan Jakpreneur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Mas Fadhil, Pembina Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Tujuan dari program permodalan ini ya mas, yang pasti itu untuk memudahkan para binaan yang ingin berkembang atau juga yang ingin memulai usaha tetapi mereka tidak memiliki modalnya, Adapun cara mencapai tujuan dari program permodalan ini Ketika pihak bank sudah menerima binaan tersebut untuk melakukan peminjaman dan binaan tersebut juga sudah menerima pinjaman tersebut. Karena kan tidak gampang ya mas untuk orang itu ingin meminjam modal ke bank kalau tanpa adanya surat rekomendasi dari Jakpreneur.”(Wawancara dengan Mas Fadhil, 2024)

Untuk mengembangkan usahanya para mitra Jakpreneur membutuhkan Program Permodalan. Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Dalmilussumagek selaku Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Tujuan diadakannya program permodalan ini, untuk para mitra yang ingin lebih mengembangkan usahanya lagi. Dikarenakan para binaan sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga pendampingan sampai akhirnya mereka ingin lebih besar lagi usahanya. Dan cara untuk mencapai tujuan dari program ini para mitra Jakpreneur sering mengikuti pemasaran yang disediakan dan omsetnya sudah meningkat setiap bulannya”(Wawancara dengan bapak Dalmilussumagek, 2024)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Bapak Egha Fahleza, Pendamping Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Tujuan dari program permodalan Jakpreneur ini ya untuk para binaan bisa lebih mengembangkan usahanya lagi ya mas”(Wawancara dengan bapak Egha Fahleza, 2024)

Menurut Mas Fadhil, Pembina Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan tujuan utama program ini adalah untuk memudahkan para binaan yang ingin mengembangkan atau memulai usaha tetapi tidak memiliki modal. Tujuan tersebut tercapai ketika pihak bank menerima binaan untuk peminjaman modal berdasarkan surat rekomendasi dari Jakpreneur, yang sulit diperoleh tanpa dukungan ini.

Program ini tidak hanya membantu dalam penyediaan modal tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Program

Jakpreneur telah menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, tujuan-tujuan pemberdayaan dan pengembangan UMKM dapat tercapai sehingga memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha kecil dan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Program Jakpreneur di Kecamatan Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, telah menunjukkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Dengan menyediakan akses permodalan, pendampingan, dan pelatihan, program ini tidak hanya membantu pelaku UMKM dalam mengatasi kendala yang mereka hadapi tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan.

e. Perubahan Nyata

Perubahan nyata meliputi peningkatan pendapatan, peningkatan omset, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pasar bagi para pelaku UMKM yang terlibat (Trulline, 2021). Perubahan nyata juga sebagai perubahan yang positif apabila terjadi pada para binaan yang sudah aktif mengikuti program-program Jakpreneur khususnya Program Permodalan. Perubahan nyata itu dapat berupa peningkatan pendapatan, peningkatan omset dan peningkatan kualitas produk hingga pasar yang semakin meluas.

Wawancara dengan Bapak Dalmilussumagek mengungkapkan bahwa para mitra yang aktif mengikuti program-program Jakpreneur mengalami peningkatan omset yang signifikan setiap bulannya. Salah satu mitra Jakpreneur yang memulai usaha dengan modal awal berkisar antara Rp.300.000 hingga Rp.500.000 dapat meningkatkan omset hingga 4-5 juta perbulan setelah aktif mengikuti program dan mendapatkan bimbingan dari pendamping Jakpreneur.

Dan mas Fadhil juga mengatakan bahwa binaan yang sudah mendapatkan Program Permodalan terjadi kenaikan omset dari modal awalnya.

“Untuk modal awal biasanya itu tergantung dari para mitranya sendiri si mas, jika mereka ingin menjadi industry rumahan itu hanya sekitar 500 ribu, tetapi kalau untuk mereka yang ingin berjualan di toko atau diluar itu pasti modalnya lebih besar. Dan pasti ada peningkatan modal setiap tahunnya bagi para binaan yang menggunakan program permodalan ini mas, seperti yang tadi saya jelaskan mas.” (Wawancara dengan mas Fadhil, 2024)

Mas Fadhil menambahkan bahwa setiap tahun terjadi kenaikan omset bagi para binaan, yang juga didukung oleh program pemasaran online dan inisiatif seperti JBL (Jumat Beli Lokal), di mana ASN diwajibkan membeli produk binaan setiap hari Jumat, sehingga membantu meningkatkan omset. Peningkatan omset serta sarana dan

prasarana yang dialami para binaan membuktikan bahwa program ini berhasil mendorong pertumbuhan usaha secara nyata.

2. Hasil Pemberdayaan UMKM Melalui Program Permodalan Jakpreneur di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan

Suatu proses pemberdayaan masyarakat itu harus menghasilkan hasil, dan proses ini tidak cukup hanya dibatasi pada kegiatan langsung. Melainkan juga mencakup masalah kehidupan masyarakat. Menurut (Mardikanto & Soebianto, 2012) ada empat kategori hasil pemberdayaan, yaitu: bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan.

a. Bina Manusia

Bina manusia menjadi prioritas utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan individu (Dianti & Effendi, 2019). Pengembangan kapasitas individu mitranya, Jakpreneur menyediakan forum sharing antar UMKM dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas binaan dalam menjalankan usaha. Berikut adalah keterangan dari Ibu Windi, pemilik Seblak Ceker Mpo Win, salah satu binaan Jakpreneur di Kecamatan Pesanggrahan:

“Banyak sih mas, karena kita juga kan ada grup WhatsApp dengan para pendamping, jadi kita bisa tanya langsung di grup tersebut. Misalkan, kita lagi ada kendala atau sebagainya, kita bisa nanya juga ke grup tersebut. Kita juga bisa menjual produk kita di grup itu. Dan kalau pelatihan dari Jakpreneur, saya sudah beberapa kali mengikuti program pelatihan di kuliner, karena kan usaha saya di bidang kuliner. Dengan mengikuti pelatihan dari Jakpreneur, saya juga mendapatkan alat untuk usaha, seperti blender dan oven. Selain mendapatkan alat, saya juga bisa mendapatkan relasi baru antar UMKM lainnya dan resep-resep enak dari Chef Bintang 5.” (Wawancara dengan ibu Windi, 2024)

Hal ini didukung oleh observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat adanya pelatihan kuliner yang diselenggarakan oleh Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan di Metro Cipulir yang berkolaborasi dengan chef profesional. Pelatihan kuliner ini dihadiri oleh 25 pelaku UMKM kuliner yang sudah menjadi mitra Program Jakpreneur.

Berdasarkan hasil observasi, program Jakpreneur berhasil menerapkan konsep bina manusia dengan memberikan pelatihan terfokus yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemasaran, serta menyediakan akses permodalan. Hal

tersebut merupakan hasil dari usaha para penampung dan juga Kasatpel Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan.

b. Bina Usaha

Bina usaha dalam teori hasil pemberdayaan Mardikanto & Soebianto (2012) merujuk pada upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha para pelaku UMKM. Bina usaha mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha, serta meningkatkan daya saing di pasar.

Pembinaan usaha yang dilakukan Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan bertujuan untuk memberikan manfaat dan perbaikan kesejahteraan ekonomi para UMKM binaan. Hasil dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Jakpreneur dalam pembinaan usaha terlihat dalam segi produktivitas penjualan dan perkembangan usaha mereka. Sebelumnya tidak memiliki penghasilan, kini mereka dapat membantu keuangan keluarga. Selain itu, dari terbatasnya modal untuk mengembangkan usaha, mereka kini mendapatkan akses permodalan dan dapat menjalankan usaha dengan lebih efektif. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Windi.

“Awalnya omset saya hanya sekitar 2-3Jt perbulannya, Sampai akhirnya saya bisa mendapatkan program permodalan dari Jakpreneur omset saya meningkat sebesar 7-10 Jt perbulannya, dan saya bisa membantu untuk anak saya sekolah ya mas, karena saya juga kan single parents. Iya sarana dan prasarana saya lebih meningkat, karena kita juga punya networking yang luas ketika bergabung dengan Jakpreneur.”(Wawancara dengan Ibu Windi, 2024)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti secara langsung, usaha Ibu Windi mendapatkan kenaikan omset serta sarana prasarana seperti bisa mempunyai *freezer* dan kompor sendiri untuk usahanya setelah mendapatkan Program Permodalan Jakpreneur.

Contoh kasus Ibu Windi menunjukkan bahwa dengan dukungan dan pendampingan yang tepat, pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha mereka dari skala kecil menjadi lebih besar serta stabil, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian keluarga dan masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang didukung oleh optimalisasi dapat memberikan hasil yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi ekonomi lokal.

c. Bina Lingkungan

Bina lingkungan adalah strategi pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi

yang memperhatikan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari Pembangunan ekonomi (Mardikanto & Soebianto, 2012). Bina lingkungan juga lebih berfokus pada upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, bina lingkungan dapat diartikan sebagai upaya untuk mendorong UMKM agar lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Program Jakpreneur, sebagai program pemberdayaan UMKM di Jakarta Selatan, perlu memperhatikan aspek bina lingkungan dalam implementasinya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Fajar pemilik dari Dasela Pembersih.

“Untuk peningkatan kualitas lingkungan di produk kita itu sudah ada dari awal mas, bukti nyatanya yaitu kita menggunakan kemasan dari botol plastik yang mudah untuk di daur ulang. Dan produk yang kita jual juga produk yang ramah lingkungan mas, bisa untuk di daur ulang juga. Tidak seperti kebanyakan produk yang sudah ada di Supermarket mereka itu menggunakan Pouch/Plastik yang sulit untuk di daur ulang.”(Wawancara dengan Bapak Fajar, 2024)



Sumber: Dokumentasi Sekunder Penelitian, 2024

Gambar 3. Produk Pak Fajar yang Mudah di Daur Ulang

Hal ini didukung oleh apa yang telah dilihat peneliti saat observasi, bahwa kemasan pada produk tersebut sudah menerapkan usaha yang peduli lingkungan terbukti dengan menggunakan kemasan yang mudah untuk didaur ulang. Sementara itu peneliti juga menemukan hasil yang tidak sesuai dengan aspek bina lingkungan seperti produk yang dimiliki oleh Bapak Shidiq bukan produk yang ramah lingkungan, tetapi walau produk yang dijual bukan produk yang ramah untuk lingkungan, ia juga mengupayakan untuk mengurangi penggunaan produk-produk yang tidak ramah

untuk lingkungan.

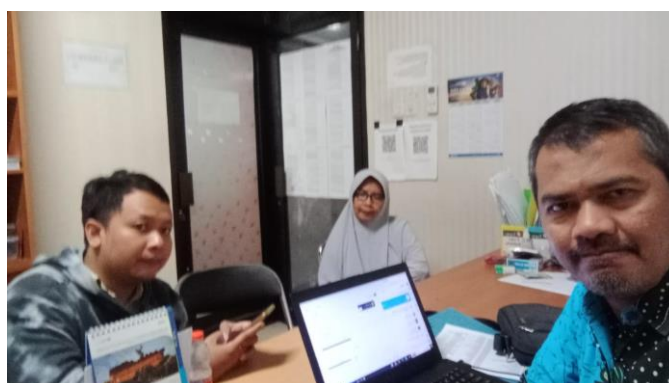
d. Bina Kelembagaan

Keberadaan bina kelembagaan memiliki peran penting dalam keberhasilan upaya bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Keberhasilan ketiga program tersebut, menunjukkan efektivitas bina kelembagaan (Mardikanto & Soebianto, 2012).

Secara garis besar, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan melalui Program Permodalannya sudah berhasil dilaksanakan meskipun belum maksimal. Penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa bina kelembagaan yang telah dilakukan oleh Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan dan para mitranya dapat memperoleh manfaat dari adanya program tersebut.

Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan mampu menumbuhkan rasa percaya serta sarana prasarana untuk membangun relasi serta membuka akses terhadap informasi dan terhadap permodalan bagi para mitranya. Bapak Shidiq mengatakan dalam wawancaranya bahwa Jakpreneur memberikan penguatan kelompok dan pendampingan.

“Iya pasti ada mas untuk penguatan kelompok dan pedanmpingannya, karena di kuliner sendiri pun memiliki kelompoknya sendiri dan itu juga tidak di fokuskan dalam 1 group umum, tetapi dibedakan setiap batchnya, jadi masing-masing batch itu punya pendampingnya masing-masing, jadi kita di bina secara langsung ketika kita lagi ada masalah atau ingin mengurus sertifikasi halal jadi kan kita tinggal hubungi pendamping kita.”(Wawancara dengan bapak Shidiq, 2024)



Sumber: Data Sekunder Penelitian, 2024

Gambar 4. Pendampingan Dengan Binaan

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, bentuk kelembagaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Jakpreneur Kecamatan Pesanggrahan yaitu membentuk kelompok kelompok sendiri setiap batchnya, dan setiap kelompok

memiliki pendamping sendiri. Setiap kelompok juga mendapatkan pendampingan khusus sebagai sumber informasi dan bantuan dalam mengatasi masalah, serta pengurusan sertifikasi atau pemberitahuan penting.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Permodalan Jakpreneur terbukti efektif dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Program ini berhasil mengatasi berbagai kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM, seperti kesulitan akses modal dan ketiadaan aset sebagai agunan. Selain itu, program ini juga berhasil meningkatkan kapasitas usaha serta daya saing pelaku UMKM. Secara keseluruhan, dampak positif dari program ini mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM, yang terlihat dari kenaikan pendapatan mereka, serta perluasan jaringan usaha yang diperoleh melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Program Jakpreneur juga berperan penting dalam memperkuat kelembagaan UMKM melalui dukungan legalitas, sertifikasi, dan pengelolaan usaha yang lebih profesional. Namun, untuk memastikan keberlanjutan manfaat yang diberikan, diperlukan evaluasi berkala serta peningkatan sosialisasi dan pelatihan yang lebih terfokus. Inovasi produk dan peningkatan kapasitas manajerial juga perlu ditingkatkan agar UMKM lebih siap menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjeli, P., & Ratnasari, W. G. P. (2024). Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Ranca Bulan di Kelurahan Keranggan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Kommunity Online*, 5(1), 15–32.
- Astuti, R. P., Kartono, K., & Rahmadi, R. (2020). Pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. *Ethos: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 248–256.
- Billy, F. (2023, February 23). 5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya. <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm>.
- Dianti, F., & Effendi, N. (2019). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Sri Tajung Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 319–332.
- Fairuz, H., Ratnasari, W. G. P., & Ant, S. (2022). Pemberdayaan UMKM Melalui Program Kampung Bebas Rentenir (KBR) Kube Berdaya Oleh Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Kummunity Online*, 3(2), 145–164.
- Hendro, J., & Arlinda, S. (2020). Pengaruh Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jak Prenenur) Terhadap Omset Penjualan UMKM di Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 31–43.

- Ikhsanudin, A. (2020, February 22). Anies Luncurkan Jakpreneur, Sempurnakan Program OK OCE. *Https://News.Detik.Com/Berita/d-4910285/Anies-Luncurkan-Jakpreneur-Sempurnakan-Program-Ok-Oce*.
- Indonesia, K. K. R. (2023). Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Djpb. Kemenkeu. Go. Id*.
- Jibril, A. (2017). Efektivitas program perpuseru di perpustakaan umum Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Universitas Airlangga*, 6(2), 1–8.
- Kecamatan, D. I., Sari, T., Barat, J., Gloria, Y. H., Administrasi, A. K., Dki, P., ... Si, M. (n.d.). *Pemberdayaan UMKM Kuliner dalam Program Jakpreneur*.
- Latifah, N. (2024). Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2022: Evaluasi Kebijakan Program. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 586–605.
- Limanseto, H. (2022). Perkembangan UMKM sebagai critical engine perekonomian nasional terus mendapatkan dukungan pemerintah. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Muhtadi, M. (2017). Pendampingan Bank Sampah Melati Bersih Berbasis Pemberdayaan Bagi Masyarakat Urban. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(2), 193–212.
- Naufall Ihza Amanaulah. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Jakpreneur di Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat*.
- Sedarmayanti, H. (2018). *Manajemen sumber daya manusia; reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Reflika Aditama.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. Alfabeta, Cv.
- Sutrisno, H. E. (2019). *Budaya organisasi*. Prenada Media.
- Trulline, P. (2021). Pemasaran produk UMKM melalui media sosial dan e-commerce. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 5(2), 259.
- Tyas, A. C., & Hertati, D. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa “Mutiar Welirang” Desa Ketapanrame, Mojokerto. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 211–219.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174–182.
- Widiastuti, S. K. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Pustaka Pelajar.
- Zahra, A. M., & Sagita, N. I. (2023). Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 260–274.